

IMPLEMENTASI PROGRAM BANK SAMPAH DALAM MENINGKATKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PROVINSI DKI JAKARTA

Karina Rahmawati Haryadi

NPP. 32.0347

Asdaf Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email: 32.0347@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dra. Pratiwi Nurhascaryani, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Waste management problems in East Jakarta City Administration are increasingly complex along with the increasing volume of waste and limited handling facilities. Although there has been a waste management policy through the waste bank program, its implementation has not been optimal due to weak coordination between agencies and low public awareness. **Purpose:** This study aims to analyze the factors that influence the effectiveness of the implementation of the waste bank program in East Jakarta City Administration. **Method:** This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, observation, and documentation of informants from the local government, waste bank managers, and the community. **Result:** The results of the study indicate that the choice of policy instruments is available but has not been utilized optimally by the implementers. The policy design and institutional structure have been formed but the implementation of SOPs is still weak, supervision is not consistent, and administrative capabilities are still limited in terms of human resources and infrastructure. Meanwhile, social acceptance shows an increase in community participation, but is not evenly distributed throughout the region. **Conclusion:** This study concludes that the success of the waste bank program needs to be supported by strengthening public education, optimizing facilities and infrastructure, and increasing synergy between implementing institutions.

Keywords: Policy Implementation, Waste Management, East Jakarta, Community Participation.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Masalah pengelolaan sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur semakin kompleks seiring meningkatnya volume sampah dan keterbatasan sarana penanganannya. Meskipun telah ada kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah, implementasinya belum berjalan optimal akibat lemahnya koordinasi antarinstansi dan rendahnya kesadaran masyarakat. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi program bank sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap informan dari pemerintah daerah, pengelola bank sampah, dan masyarakat. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pilihan instrumen kebijakan

sudah tersedia namun belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaksana. Desain kebijakan dan struktur kelembagaan sudah terbentuk namun pelaksanaan SOP masih lemah, pengawasan belum konsisten, dan kemampuan administratif masih terbatas dari sisi SDM dan infrastruktur. Sementara itu, penerimaan sosial menunjukkan peningkatan partisipasi masyarakat, namun belum merata di seluruh wilayah. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan program bank sampah perlu ditopang oleh penguatan edukasi publik, optimalisasi sarana dan prasarana, serta peningkatan sinergi antar lembaga pelaksana.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah, Jakarta Timur, Partisipasi Masyarakat.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Permasalahan sampah di wilayah perkotaan, khususnya di Kota Administrasi Jakarta Timur, semakin kompleks seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat yang berdampak langsung terhadap timbulan sampah. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), volume sampah yang dihasilkan Provinsi DKI Jakarta mencapai sekitar 8.000 ton per hari atau sekitar 3 juta ton per tahun pada tahun 2024. Kota Administrasi Jakarta Timur menjadi penyumbang terbesar timbulan sampah di antara wilayah lain di DKI Jakarta dengan rata-rata mencapai 844.275 ton per tahun (SIPSN, 2023).

Tingginya volume sampah tersebut tidak sebanding dengan kemampuan pengelolaan yang tersedia, baik dari segi fasilitas, tenaga, maupun kesadaran masyarakat. Kondisi ini menimbulkan berbagai dampak negatif seperti pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan, hingga potensi banjir akibat tersumbatnya saluran air. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pemerintah diwajibkan menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Salah satu strategi yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah melalui implementasi Program Bank Sampah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2021 tentang Bank Sampah.

Bank sampah merupakan sarana edukatif sekaligus ekonomi yang mendorong masyarakat untuk memilah, menyeter, dan mengelola sampah anorganik bernilai ekonomis. Dalam praktiknya, program ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA), tetapi juga menjadi bagian dari pemberdayaan masyarakat dan penerapan prinsip ekonomi sirkular di tingkat lokal. Namun demikian, implementasi program bank sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur masih menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya keterlibatan masyarakat secara merata, kurangnya fasilitas penunjang, serta lemahnya koordinasi kelembagaan dan pengawasan.

Dalam konteks kebijakan publik, keberhasilan suatu program sangat bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di lapangan. Efektivitas implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh sejauh mana partisipasi publik diakomodasi dalam prosesnya (Hamdi, 2014). Partisipasi masyarakat merupakan salah satu penentu keberhasilan pengelolaan sampah berkelanjutan, khususnya di daerah urban yang padat penduduk (Kalra, 2019). Menurut Knill & Tosun (2020), efektivitas implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu pilihan instrumen kebijakan, desain kebijakan, struktur pengawasan, desain kelembagaan, kemampuan administratif, dan penerimaan sosial. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana keenam aspek tersebut berjalan dalam pelaksanaan Program Bank

Sampah di Jakarta Timur, serta sejauh mana program ini memberikan dampak terhadap pengelolaan sampah secara berkelanjutan dan partisipatif.

Dengan mempertimbangkan urgensi permasalahan dan pentingnya keberhasilan program pengelolaan sampah, maka penelitian ini dilakukan dengan fokus pada analisis implementasi Program Bank Sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai salah satu upaya strategis dalam menciptakan tata kelola lingkungan yang lebih baik. Penelitian Susilowati dan Herdiansyah (2019) menunjukkan bahwa penerapan bank sampah di wilayah pinggiran kota efektif menurunkan volume sampah rumah tangga dan meningkatkan perilaku memilah sampah sejak dari sumber.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penelitian ini mengangkat permasalahan utama berupa bagaimana implementasi Program Bank Sampah dalam meningkatkan pengelolaan sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Permasalahan ini dilatarbelakangi oleh kondisi empirik di mana meskipun kebijakan bank sampah telah ditetapkan melalui berbagai regulasi, seperti Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri LHK Nomor 14 Tahun 2021, realisasi di lapangan masih belum optimal. Beberapa indikasi ketidakefektifan tersebut terlihat dari rendahnya pemanfaatan fasilitas bank sampah oleh masyarakat, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta keterbatasan sumber daya pendukung, baik dari sisi kelembagaan maupun administratif.

Sejumlah studi terdahulu telah membahas implementasi program bank sampah di berbagai wilayah, antara lain oleh Nurhajati (2022) di Tulungagung, Megariska & Sukmana (2022) di Sidoarjo, dan Cahyadi dkk. (2018) di Purbalingga. Namun, fokus kajian tersebut lebih banyak menitikberatkan pada aspek partisipasi masyarakat, keberhasilan ekonomi mikro, atau efektivitas teknis pengelolaan sampah. Studi terbaru oleh Dahlan *et al.* (2024) menemukan bahwa pengelolaan bank sampah di Jakarta Timur dan Depok belum optimal karena lemahnya aspek kelembagaan dan keterbatasan pengawasan. Selain itu, penelitian-penelitian tersebut belum menyoroti secara spesifik bagaimana kompleksitas kebijakan ini berjalan dalam konteks wilayah urban yang padat seperti Kota Administrasi Jakarta Timur, serta belum menggunakan pendekatan evaluatif berbasis enam dimensi implementasi kebijakan menurut Knill & Tosun (2020), yakni pilihan instrumen kebijakan, desain kebijakan, struktur pengawasan, desain kelembagaan, kemampuan administratif, dan penerimaan sosial.

Kondisi di Kota Administrasi Jakarta Timur menunjukkan adanya celah antara tujuan normatif kebijakan bank sampah dan capaian riil di lapangan. Hal ini tercermin dari masih rendahnya angka daur ulang dan minimnya kesadaran masyarakat terhadap pemilahan sampah, yang berkontribusi pada tingginya volume sampah menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai seberapa efektif kebijakan bank sampah dalam diterapkan di kawasan perkotaan yang kompleks. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengisi kesenjangan akademik tersebut, dengan menyajikan kajian implementatif berbasis konteks lokal serta pemanfaatan pendekatan teoritis yang sistematis guna menghasilkan rekomendasi perbaikan kebijakan yang lebih responsif, terukur, dan tepat sasaran.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai implementasi program bank sampah telah dilakukan di berbagai daerah dengan beragam pendekatan dan fokus analisis. Salah satu studi yang menonjol adalah penelitian oleh Nurhajati (2022) di Kabupaten Tulungagung yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat secara aktif mampu mengurangi volume sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sekaligus

meningkatkan kesadaran warga terhadap pentingnya pemilahan dan pengelolaan sampah dari sumbernya.

Megariska & Sukmana (2022) meneliti program bank sampah di Desa Larangan, Kecamatan Candi, dengan fokus pada peran ekonomi rumah tangga dalam implementasi program. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa partisipasi ibu rumah tangga dalam menabung sampah berkontribusi pada peningkatan pendapatan keluarga. Namun demikian, keterlambatan penyediaan fasilitas serta kurangnya pelatihan teknis menjadi kendala dalam keberlangsungan program. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan infrastruktur dan peningkatan kapasitas sumber daya menjadi aspek penting yang belum optimal dalam pelaksanaan program bank sampah.

Cahyadi dkk. (2018) juga melakukan kajian serupa di Kabupaten Purbalingga. Mereka menyoroti implementasi kebijakan pengelolaan sampah dari sisi kinerja pelaksana dan struktur pengawasan. Temuan utama mereka menunjukkan bahwa meskipun program telah berjalan, kepatuhan terhadap standar operasional masih rendah, dan pengawasan dari lembaga terkait belum berjalan efektif. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara regulasi yang ditetapkan dengan pelaksanaan teknis di lapangan.

Hastuti & Anwar (2021) dalam penelitiannya di Kabupaten Bengkulu Selatan memberikan perhatian khusus pada hambatan implementasi yang bersifat struktural, seperti minimnya anggaran, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta keterbatasan fasilitas pendukung. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh partisipasi masyarakat, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan dan dukungan logistik yang memadai dari pemerintah daerah. Tanpa dukungan tersebut, efektivitas implementasi program akan sulit dicapai.

Gimnastiard kk. (2023) menawarkan pendekatan yang berbeda melalui kajian mereka di Kelurahan Kalipancur, Kota Semarang, dengan menyoroti pentingnya *collaborative governance* dalam pelaksanaan bank sampah. Studi ini mengungkapkan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada kolaborasi antar aktor, yakni pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, serta pentingnya koordinasi kelembagaan dan tata kelola yang transparan. Penelitian ini memberikan perspektif baru bahwa pendekatan kolaboratif menjadi kunci untuk menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan inklusif. Namun, kelima studi tersebut umumnya belum mengkaji implementasi kebijakan secara menyeluruh berdasarkan enam dimensi implementasi menurut Knill & Tosun (2020), sehingga penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dalam konteks Kota Administrasi Jakarta Timur.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah dalam kajian implementasi program bank sampah yang belum secara komprehensif dilakukan dalam penelitian-penelitian terdahulu, khususnya di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai daerah urban dengan kepadatan penduduk tertinggi di Provinsi DKI Jakarta dan tingkat timbulan sampah paling besar. Berbeda dengan studi sebelumnya yang lebih banyak menitikberatkan pada aspek partisipasi masyarakat (Nurhajati, 2022; Megariska & Sukmana, 2022), dampak ekonomi mikro rumah tangga (Cahyadi dkk., 2018), maupun pendekatan kolaboratif antarpemangku kepentingan (Gimnastiar dkk., 2023), penelitian ini memfokuskan analisis pada dimensi implementasi kebijakan yang bersifat struktural dan sistematis.

Kebaruan utama penelitian ini terletak pada penggunaan kerangka teori Knill & Tosun (2020) yang mencakup enam dimensi implementasi kebijakan: pilihan instrumen kebijakan, desain kebijakan, struktur pengawasan, desain kelembagaan, kemampuan administratif, dan penerimaan sosial. Dimensi-dimensi tersebut belum pernah digunakan secara utuh dalam studi-studi terdahulu mengenai program bank sampah, yang umumnya hanya menggunakan pendekatan partisipasi, ekonomi, atau pengawasan. Dengan mengkaji keenam dimensi ini

secara simultan, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan implementasi kebijakan bank sampah.

Selain itu, konteks geografis dan administratif penelitian ini juga memberikan nilai tambah dari sisi kebaruan. Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai lokasi penelitian belum banyak dikaji secara khusus dalam literatur terdahulu, padahal wilayah ini merupakan kontributor terbesar sampah di Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan kontribusi empiris yang penting dalam memahami tantangan dan strategi implementasi kebijakan lingkungan di wilayah urban yang kompleks.

Secara metodologis, pendekatan kualitatif deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini juga dilengkapi dengan triangulasi data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang difokuskan pada aktor pelaksana kebijakan dan masyarakat pengguna langsung program bank sampah. Pendekatan ini memberikan kedalaman analisis yang berbeda dibandingkan studi-studi terdahulu yang umumnya berfokus pada persepsi masyarakat saja atau pada unit sekolah/kampung tertentu. Dengan seluruh keunikan pendekatan teoritis, metodologis, dan kontekstual yang ditawarkan, penelitian ini diyakini memberikan kontribusi kebaruan ilmiah baik dalam pengembangan kajian kebijakan publik maupun dalam praktik implementasi program pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Bank Sampah dalam pengelolaan sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Secara khusus, penelitian ini ingin mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program, serta mengevaluasi sejauh mana program tersebut memberikan dampak terhadap pengurangan volume sampah dan peningkatan partisipasi masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan enam dimensi implementasi kebijakan menurut Knill dan Tosun (2020), penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai kualitas pelaksanaan kebijakan bank sampah di wilayah urban padat, serta menghasilkan rekomendasi strategis bagi penguatan tata kelola lingkungan berbasis partisipasi masyarakat.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali fenomena secara mendalam, alami, dan kontekstual. Pendekatan kualitatif memberikan ruang lebih luas dalam menangkap dinamika sosial dan makna subjektif dari kebijakan yang sedang diteliti (Nurdin & Hartati, 2018). Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami secara komprehensif bagaimana implementasi Program Bank Sampah dijalankan di Kota Administrasi Jakarta Timur, termasuk interaksi antara aktor pelaksana, masyarakat, serta kendala dan dinamika yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini dinilai relevan mengingat permasalahan pengelolaan sampah tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga melibatkan aspek sosial, kelembagaan, dan kebijakan publik. Penelitian dalam bidang pemerintahan memerlukan pemahaman konteks birokrasi dan dinamika kelembagaan agar hasilnya mampu memberi rekomendasi kebijakan yang aplikatif (Simangunsong, 2019).

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 6 hingga 25 Januari 2025, berlokasi di beberapa bank sampah aktif yang berada di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Lokasi ini dipilih karena Jakarta Timur merupakan wilayah dengan volume timbulan sampah tertinggi di DKI Jakarta, sehingga menjadi fokus penting dalam kebijakan pengelolaan sampah perkotaan. Penelitian ini mengacu pada teori implementasi kebijakan menurut Knill & Tosun (2020) yang

mencakup enam dimensi utama: pilihan instrumen kebijakan, desain kebijakan, struktur pengawasan, desain kelembagaan, kemampuan administratif, dan penerimaan sosial. Teori ini dipilih karena menyediakan kerangka yang sistematis dan menyeluruh dalam mengevaluasi keberhasilan maupun hambatan implementasi suatu kebijakan.

Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *accidental sampling*. Informan kunci meliputi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, pengelola bank sampah, dan Kepala Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan. Mereka dipilih karena memiliki otoritas, pengalaman, serta keterlibatan langsung dalam pelaksanaan kebijakan bank sampah. Selain itu, lima orang warga yang aktif menjadi nasabah bank sampah juga diwawancarai untuk memperoleh perspektif dari sisi masyarakat sebagai penerima manfaat kebijakan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan secara mendalam melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2019). Instrumen penelitian disusun berdasarkan indikator dalam masing-masing dimensi teori Knill dan Tosun, yang kemudian digunakan untuk menggali informasi dari informan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis interaktif yang terdiri dari tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk memastikan validitas data, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran utuh tentang efektivitas implementasi Program Bank Sampah dalam meningkatkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan partisipatif

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini membahas temuan-temuan yang diperoleh selama proses penelitian mengenai implementasi Program Bank Sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Pembahasan didasarkan pada data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis secara mendalam untuk menjelaskan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat. Peneliti merelevansikan hasil temuan dengan teori implementasi kebijakan menurut Knill dan Tosun (2020) yang mencakup enam dimensi, yaitu pilihan instrumen kebijakan, desain kebijakan, struktur pengawasan, desain kelembagaan, kemampuan administratif, dan penerimaan sosial. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan kajian ilmiah yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menjelaskan efektivitas program dalam mengurangi penumpukan sampah di wilayah perkotaan.

3.1. Faktor Pendukung dan Penghambat yang Dihadapi oleh Pengelola Bank Sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur telah mengupayakan pengurangan timbulan sampah melalui berbagai program, salah satunya adalah Program Bank Sampah, yang mendorong masyarakat untuk memilah sampah rumah tangga dan menukarkannya di bank sampah lingkungan, seperti Bank Sampah Melati. Program ini tidak hanya bertujuan mengurangi volume sampah, tetapi juga membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, melalui insentif dan edukasi mengenai pemilahan sampah organik dan non-organik. Sampah organik dapat dijadikan kompos, sementara sampah non-organik seperti plastik dan kertas memiliki nilai ekonomis. Sebagai bagian dari kebijakan pengelolaan sampah Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur, program ini dinilai strategis dalam menciptakan sistem pengelolaan berbasis masyarakat. Dalam penelitian ini, implementasi program dianalisis menggunakan enam dimensi teori Knill dan Tosun (2020), yaitu pilihan

instrumen kebijakan, desain kebijakan, struktur pengawasan, desain kelembagaan, kemampuan administratif, dan penerimaan sosial.

a. Pemilihan Instrumen Kebijakan

Dalam implementasi Program Bank Sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur, pemilihan instrumen kebijakan menjadi langkah strategis untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah. Berdasarkan teori Knill dan Tosun (2020), pemerintah yang menghadapi lingkungan kebijakan kompleks dan memiliki kapasitas tinggi dapat menggunakan instrumen arahan (*directive instruments*), yang bersifat mengikat secara hukum. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur telah memilih pendekatan ini melalui serangkaian regulasi seperti Peraturan Menteri LHK Nomor 14 Tahun 2021, Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2021, serta dua Instruksi Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 dan Nomor 107 Tahun 2019. Instrumen ini dianggap tepat karena memberi kerangka hukum yang jelas dalam pelaksanaan program bank sampah di lingkungan masyarakat.

Ketepatan pemilihan instrumen juga tercermin dari pernyataan para pemangku kebijakan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur menyampaikan bahwa peraturan-peraturan tersebut menjadi acuan utama dalam menjalankan program, dilengkapi dengan sosialisasi dan edukasi di sekolah-sekolah maupun masyarakat. Hal ini diperkuat oleh Kepala Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 yang menyebutkan bahwa tantangan utama bukan pada ketidakjelasan instrumen, melainkan pada kurangnya konsistensi masyarakat dalam memilah dan menyetorkan sampah secara rutin. Dengan demikian, meskipun regulasi telah tersedia dan bersifat mengatur, efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kepatuhan masyarakat sebagai penerima kebijakan.

Dari sisi pelaksanaan di lapangan, kemudahan instrumen dinilai cukup tinggi oleh para pelaksana, baik dari kalangan pemerintah maupun pengelola bank sampah. Mereka menyatakan bahwa program ini secara konsep mudah dijalankan karena memiliki prosedur yang jelas. Namun, tantangan struktural dan teknis tetap ada, seperti keterbatasan fasilitas penampungan sampah, minimnya tenaga pengelola, serta kurangnya jalur pengangkutan sampah daur ulang di beberapa wilayah. Administrasi negara yang baik menuntut adanya integrasi antara regulasi, pelaksana kebijakan, dan masyarakat sebagai objek maupun subjek kebijakan (Syafii, 2019). Kepala Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Jakarta Timur menambahkan bahwa rendahnya kepedulian masyarakat dan belum meratanya edukasi menyebabkan ketimpangan partisipasi antarwilayah. Ini menunjukkan bahwa instrumen yang baik perlu diimbangi dengan dukungan sarana prasarana dan pendekatan lokal yang adaptif.

Partisipasi masyarakat masih menjadi faktor kritis dalam memastikan keberhasilan implementasi instrumen kebijakan ini. Meskipun tersedia insentif finansial dan dukungan regulatif, motivasi internal masyarakat untuk mengubah kebiasaan membuang sampah secara campuran masih rendah. Ini juga disampaikan oleh pengelola bank sampah yang menyatakan bahwa keberhasilan pemilahan sampah bergantung pada kemauan warga, bukan hanya pada instrumen kebijakan yang tersedia. Oleh karena itu, dukungan edukasi berkelanjutan dan kampanye publik menjadi komponen penting untuk melengkapi efektivitas instrumen arahan yang diterapkan pemerintah.

Terlepas dari berbagai tantangan, keberadaan instrumen kebijakan tersebut mulai menunjukkan hasil positif, tercermin dari peningkatan signifikan volume sampah yang berhasil dikelola oleh bank sampah setiap tahunnya sejak 2021 hingga 2024. Volume ini meningkat dari 377.652,4 kg pada tahun 2021 menjadi 1.172.347,91 kg di tahun 2024. Tren ini menunjukkan bahwa meskipun implementasi belum maksimal, arah kebijakan yang ditempuh telah memberikan dampak terhadap perubahan perilaku sebagian

masyarakat. Namun, untuk mencapai efektivitas yang lebih merata, dibutuhkan perbaikan dalam strategi pelibatan masyarakat, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan logistik agar instrumen kebijakan yang telah disusun dapat dijalankan secara optimal di seluruh wilayah Jakarta Timur.

b. Desain Kebijakan

Desain kebijakan merupakan dimensi penting dalam mengukur keberhasilan implementasi sebuah program. Berdasarkan teori Knill dan Tosun (2020), desain kebijakan yang baik harus mencakup kejelasan prosedur, waktu pelaksanaan, dan sumber daya yang dibutuhkan, serta konsistensi terhadap tujuan kebijakan awal. Dalam konteks implementasi Program Bank Sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur, unsur-unsur tersebut telah dijabarkan melalui Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 107 Tahun 2019 yang mengatur tahapan operasional, struktur organisasi, serta pembagian tugas dan tanggung jawab pelaksana program.

Kejelasan prosedur dalam program bank sampah telah diatur dalam enam tahapan utama, yaitu pendaftaran nasabah, pengumpulan, penimbangan dan pencatatan, penilaian dan penyeteroran, penarikan tabungan, dan pelaporan. Waktu pelaksanaan disesuaikan dengan masing-masing bank sampah, umumnya dilakukan secara berkala (mingguan atau bulanan), dan diinformasikan melalui media komunikasi warga seperti *WhatsApp*. Sumber daya manusia dalam program ini terdiri dari pengurus yang berasal dari masyarakat setempat dengan jabatan ketua, sekretaris, bendahara, *teller*, serta tim penimbang dan pemilah. Kendati demikian, kendala tetap muncul, seperti kurangnya tenaga operasional dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap jadwal penyeteroran, yang menyebabkan ketidaksesuaian antara prosedur yang dirancang dan pelaksanaan di lapangan.

Hasil wawancara dengan pejabat dari Dinas Lingkungan Hidup dan pengelola bank sampah menunjukkan bahwa meskipun aturan dan prosedur sudah tersosialisasi, tingkat kepatuhan masyarakat masih bervariasi. Beberapa masyarakat lupa jadwal penyeteroran atau tidak memahami pentingnya memilah sampah, sehingga prosedur yang seharusnya berjalan terhambat. Selain itu, minimnya sarana dan prasarana, serta kurangnya konsistensi pengangkutan oleh mitra daur ulang juga menjadi hambatan teknis yang berdampak pada efektivitas program.

Pada aspek kedua, yaitu jumlah perubahan tujuan kebijakan dari desain awal, ditemukan bahwa program bank sampah mengalami perkembangan signifikan. Awalnya, kebijakan ini berfokus pada pengurangan volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Namun, seiring waktu, tujuan program berkembang mencakup penguatan ekonomi sirkular, kerja sama dengan industri daur ulang, pemberdayaan masyarakat, serta pemberian insentif ekonomi seperti tabungan atau poin belanja bagi nasabah aktif. Perubahan ini terjadi karena adanya kesadaran bahwa insentif ekonomi dapat menjadi motivasi efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Dengan demikian, dimensi desain kebijakan dalam implementasi program bank sampah di Jakarta Timur sudah memiliki landasan regulatif yang jelas. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan operasional dan rendahnya kesadaran masyarakat. Meski demikian, perkembangan tujuan program menjadi lebih adaptif dan multidimensi menunjukkan bahwa kebijakan ini mengalami peningkatan relevansi terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini menjadi indikasi positif bahwa program bank sampah tidak hanya berfungsi sebagai strategi pengurangan sampah, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan di wilayah perkotaan.

c. Struktur Pengawasan

Struktur pengawasan merupakan salah satu dimensi penting dalam memastikan efektivitas implementasi kebijakan publik. Berdasarkan teori Knill dan Tosun (2020), pengawasan dapat dilakukan secara formal oleh lembaga atau badan resmi, dan secara informal oleh masyarakat. Dalam konteks Program Bank Sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur, kedua bentuk pengawasan ini berjalan secara paralel dan saling melengkapi. Pengawasan bertujuan untuk mengidentifikasi penyimpangan dari prosedur, mengevaluasi pelaksanaan program, serta mendorong keterlibatan seluruh aktor dalam mewujudkan kebijakan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.

Pengawasan informal oleh masyarakat berperan besar dalam mengontrol jalannya program di tingkat lokal. Masyarakat dilibatkan untuk melaporkan kendala di lapangan seperti keterlambatan pengangkutan sampah, ketidaksesuaian prosedur, atau keluhan terkait pengelolaan bank sampah. Forum warga, media sosial, dan kelompok kerja lingkungan menjadi sarana utama dalam menyampaikan pengawasan tersebut. Pernyataan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan pengelola bank sampah menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran untuk saling mengingatkan dan berperan aktif dalam menjaga kelancaran pelaksanaan program. Edukasi dan sosialisasi oleh komunitas juga memperkuat pengawasan partisipatif ini, sekaligus meningkatkan kesadaran kolektif tentang pentingnya pemilahan sampah dari rumah.

Sementara itu, pengawasan formal dilakukan oleh badan pemerintah seperti Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Pengawasan ini mencakup monitoring berkala, inspeksi lapangan, audit terhadap bank sampah terdaftar, evaluasi pencapaian target, serta pelatihan dan bimbingan teknis kepada pengelola. Berdasarkan hasil wawancara, pengawasan dilakukan setiap 3–6 bulan, meskipun beberapa pengelola bank sampah menyatakan bahwa frekuensi pengawasan di lapangan masih perlu ditingkatkan agar lebih optimal. Dukungan berupa regulasi, alat pemilah, dan fasilitas pendukung juga diberikan oleh pemerintah, meskipun belum merata di seluruh wilayah.

Meskipun kedua jenis pengawasan telah diterapkan, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya. Sebagian masyarakat belum memahami prosedur secara utuh atau lupa terhadap jadwal pelaksanaan program, yang menyebabkan terjadinya penumpukan sampah atau sampah terpilah kembali tercampur. Di sisi lain, pengawasan oleh instansi pemerintah belum sepenuhnya menjangkau seluruh bank sampah secara rutin, sehingga terdapat celah dalam evaluasi dan perbaikan di tingkat operasional. Selain itu, keterbatasan sarana prasarana serta jumlah pengelola juga menghambat pengawasan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa struktur pengawasan terhadap Program Bank Sampah di Jakarta Timur telah dibentuk dengan baik secara dualistik, yakni pengawasan oleh masyarakat dan pemerintah. Namun, agar kebijakan berjalan lebih efektif, diperlukan peningkatan intensitas pengawasan formal, penguatan kapasitas kelembagaan pengelola, dan peningkatan peran aktif masyarakat. Sinergi antara aktor negara dan warga menjadi kunci penting dalam menciptakan sistem pengawasan yang tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai pendorong partisipasi dan pembelajaran bersama dalam pengelolaan sampah secara berkelanjutan.

d. Desain Kelembagaan

Dalam teori implementasi kebijakan oleh Knill dan Tosun (2020), desain kelembagaan merujuk pada sejauh mana keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan dipengaruhi oleh struktur kelembagaan yang mendukung, termasuk organisasi pelaksana dan bentuk koordinasi antarlembaga. Tidak cukup hanya memiliki instrumen kebijakan yang tepat; keberhasilan juga sangat ditentukan oleh jumlah lembaga yang terlibat dan

kualitas kerja sama antarorganisasi dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam konteks Program Bank Sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur, desain kelembagaan menunjukkan struktur pelaksana yang beragam dan koordinasi yang kompleks namun belum sepenuhnya optimal.

Terdapat tiga organisasi utama yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan program, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur, Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup tingkat Kecamatan, serta unit-unit Bank Sampah yang tersebar di seluruh wilayah. Berdasarkan data, jumlah anggota pelaksana mencapai 535 orang, dengan komposisi terbesar berasal dari unit bank sampah (446 unit), mencerminkan tingginya keterlibatan komunitas lokal. Selain ketiga aktor utama ini, terdapat pula pelibatan organisasi eksternal seperti sekolah, komunitas lingkungan, CSR perusahaan, dan mitra daur ulang yang turut membantu pengelolaan dan pemanfaatan sampah.

Meskipun jumlah organisasi yang terlibat cukup banyak, pengelola bank sampah menilai bahwa itu masih belum cukup jika dibandingkan dengan jumlah sampah yang harus ditangani setiap harinya. Oleh karena itu, perluasan kemitraan dan pelibatan aktor non-pemerintah menjadi kunci penting untuk memperkuat efektivitas kelembagaan program. Koordinasi antarorganisasi juga menjadi tantangan tersendiri, sebagaimana dijelaskan oleh beberapa informan yang menyebutkan adanya perbedaan komitmen dan kesiapan antarwilayah. Keberhasilan program daerah sangat bergantung pada kemampuan organisasi lokal dalam membangun sinergi antara perencanaan dan pelaksanaan kebijakan (Hamid, 2018). Beberapa kecamatan memiliki pengelolaan yang sangat aktif dan tertib, sementara di wilayah lain, program berjalan lambat akibat rendahnya partisipasi warga dan lemahnya dukungan perangkat daerah.

Secara kelembagaan, koordinasi dilakukan melalui pertemuan rutin, grup komunikasi, serta kerja sama teknis antarinstansi. Dinas Lingkungan Hidup menjadi pusat koordinasi, didukung oleh pelaksana kecamatan dan pengelola bank sampah. Namun, kendala seperti keterlambatan pengangkutan sampah terpilah dan kurangnya sinkronisasi dengan mitra daur ulang masih sering terjadi. Hambatan ini menyebabkan distribusi sampah yang seharusnya didaur ulang menjadi tertunda, bahkan bercampur kembali dengan sampah biasa, sehingga mengurangi efektivitas program.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, peningkatan kapasitas koordinasi antarorganisasi menjadi hal yang mendesak. Pemerintah perlu membangun sistem komunikasi yang lebih terintegrasi, melakukan evaluasi rutin, dan memperkuat kapasitas SDM di semua tingkatan. Selain itu, edukasi dan pembinaan masyarakat harus terus dilakukan untuk memperkuat dukungan sosial terhadap kelembagaan yang sudah dibangun. Dukungan dari sektor swasta juga perlu diperluas agar program bank sampah tidak hanya menjadi program lingkungan, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi dan memperkuat sistem pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular.

Dengan memperkuat desain kelembagaan melalui penambahan mitra, peningkatan koordinasi, dan pembagian peran yang lebih jelas, Program Bank Sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Pendekatan multi-aktor yang terorganisir dengan baik akan menjadi pondasi penting dalam mencapai tujuan pengurangan sampah, pemberdayaan masyarakat, dan pelestarian lingkungan secara menyeluruh.

e. Kemampuan Administratif

Kemampuan administratif merupakan salah satu dimensi penting dalam memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan. Berdasarkan Knill & Tosun (2020), kemampuan administratif mengacu pada sejauh mana lembaga pelaksana memiliki sumber daya yang memadai, baik dari segi sumber

daya manusia, keuangan, teknologi, maupun informasi, serta kapasitas dalam menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan. Dalam konteks implementasi program bank sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur, dimensi ini diukur melalui tiga indikator utama: ketersediaan sumber daya, kecukupan sumber daya, dan kemampuan melaksanakan SOP.

Dari sisi ketersediaan sumber daya, program bank sampah telah memiliki struktur dasar yang cukup baik. Sumber daya manusia tersedia di tiap unit bank sampah, yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, penimbang, dan pemilah. Misalnya, di Kelurahan Pinangranti, dua bank sampah aktif memiliki total 25 petugas yang menjalankan operasional harian. Dari sisi keuangan, dana operasional berasal dari hasil tabungan sampah nasabah yang dikelola secara mandiri. Teknologi yang digunakan antara lain timbangan digital dan sistem informasi pengelolaan berbasis SILIKA dan SIPSN. Di bidang informasi, terdapat akses terhadap tiga portal utama, yakni situs Bank Sampah Jakarta, SILIKA, dan SIPSN yang menyediakan data nasabah, timbulan sampah, dan lokasi bank sampah aktif.

Namun, dari segi kecukupan sumber daya, masih ditemukan sejumlah kendala. Meskipun Kepala Dinas Lingkungan Hidup menyatakan bahwa secara umum tenaga operasional mencukupi karena melibatkan warga RW dan RT, pengelola bank sampah dan Kepala Seksi Pengelolaan Sampah mengungkapkan bahwa masih ada kekurangan tenaga pengelola di beberapa wilayah. Keterbatasan juga ditemukan dalam hal transportasi sampah dan fasilitas pengolahan yang belum merata. Sementara itu, anggaran khusus dari pemerintah belum tersedia; dukungan hanya berupa kendaraan pengangkut sampah ke mitra daur ulang. Teknologi masih terbatas pada timbangan digital, dan akses informasi belum sepenuhnya menjangkau masyarakat secara merata. Dua sumber informasi utama memang tersedia, tetapi belum banyak dimanfaatkan secara maksimal dalam edukasi dan sosialisasi publik.

Pada indikator kemampuan melaksanakan SOP, pemerintah telah melakukan sosialisasi prosedur kepada pengelola dan masyarakat. SOP meliputi alur pendaftaran, penimbangan, pencatatan, hingga pencairan tabungan. Namun, penerapan SOP di lapangan masih belum konsisten. Beberapa pengelola kesulitan dalam menjaga akurasi pencatatan dan pelaporan, sementara partisipasi masyarakat yang fluktuatif juga menghambat pelaksanaan yang seragam di semua wilayah. Evaluasi rutin dan pendampingan telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, namun implementasi yang efektif masih bergantung pada kesiapan pengelola dan kesadaran masyarakat.

Secara keseluruhan, meskipun struktur administratif dasar telah tersedia dan ada upaya pemerintah untuk memperkuat pelaksanaan melalui pelatihan dan pendampingan, tantangan terkait kecukupan dan konsistensi pelaksanaan masih cukup signifikan. Terbatasnya anggaran, tenaga operasional, dan fasilitas mendukung menjadi kendala utama yang memengaruhi efektivitas program. Untuk itu, peningkatan kapasitas SDM, dukungan dana operasional, serta perluasan penggunaan teknologi dan akses informasi menjadi langkah penting yang harus diambil agar kemampuan administratif dalam pelaksanaan Program Bank Sampah dapat lebih optimal dan berkelanjutan.

f. Penerimaan Sosial

Penerimaan sosial menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik. Dalam pandangan Knill dan Tosun (2020), keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat sebagai penerima kebijakan merasakan manfaat dan menunjukkan keterlibatan aktif. Dalam konteks Program Bank Sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur, dimensi penerimaan sosial mencakup dua hal utama: tingkat kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat, dan sejauh mana masyarakat terlibat dalam mendukung keberlangsungan program.

Dari aspek tingkat kemanfaatan yang dirasakan, masyarakat di sejumlah wilayah Jakarta Timur telah merasakan dampak positif dari keberadaan program bank sampah, baik dari sisi lingkungan maupun ekonomi. Wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa manfaat program sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Jika masyarakat ikut memilah dan menyetorkan sampah, maka mereka bisa memperoleh insentif ekonomi dan lingkungan yang lebih bersih. Kepala Seksi Pengelolaan Sampah dan pengelola bank sampah juga menambahkan bahwa selain berhasil mengurangi volume sampah rumah tangga, program ini telah meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat. Beberapa warga juga memperoleh manfaat ekonomi langsung dari hasil penjualan sampah.

Namun, manfaat program ini belum tersebar merata karena tingkat partisipasi masyarakat yang masih bervariasi di tiap wilayah. Beberapa warga telah aktif dan merasakan manfaatnya, namun banyak pula yang belum terlibat, baik karena kurangnya informasi, motivasi, maupun kesadaran lingkungan. Oleh karena itu, peningkatan sosialisasi dan strategi pemberdayaan masyarakat menjadi kunci untuk memperluas dampak positif dari program bank sampah ini di seluruh kecamatan di Jakarta Timur.

Dari aspek keterlibatan masyarakat, program bank sampah bergantung penuh pada partisipasi warga karena pengelolaan program dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Kepala Dinas Lingkungan Hidup menekankan bahwa pengelola bank sampah berasal dari masyarakat setempat di tingkat RT/RW, sehingga program ini sejatinya bersifat partisipatif dan berbasis komunitas. Kepala Seksi Pengelolaan Sampah menambahkan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya dibutuhkan dalam proses pengumpulan dan pemilahan sampah, tetapi juga dalam kegiatan pelatihan, diskusi, dan pengembangan sistem pengelolaan mandiri. Pemerintahan modern dituntut tidak hanya responsif, tetapi juga adaptif terhadap kebutuhan masyarakat melalui pendekatan partisipatif dan berorientasi hasil (Rahman, 2018).

Meskipun ada wilayah dengan tingkat partisipasi tinggi, seperti yang terlihat dari data Bank Sampah Melati yang menunjukkan keaktifan warga dalam setiap pertemuan, masih banyak wilayah lain yang kurang terlibat. Pengelola bank sampah mencatat bahwa partisipasi yang tidak merata disebabkan oleh kurangnya strategi untuk menjangkau masyarakat yang belum paham atau belum terdorong untuk ikut serta. Hal ini menandakan perlunya pendekatan yang lebih adaptif dan berbasis kebutuhan lokal untuk menggerakkan kesadaran kolektif dan keberlanjutan program.

Secara keseluruhan, dimensi penerimaan sosial dalam program bank sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur menunjukkan adanya potensi keberhasilan yang cukup kuat, terutama pada wilayah dengan masyarakat yang aktif dan sadar lingkungan. Namun, agar penerimaan sosial ini dapat merata dan mendalam di seluruh wilayah, diperlukan intervensi tambahan berupa edukasi, insentif yang menarik, serta strategi komunikasi yang efektif untuk mengajak lebih banyak warga terlibat. Dengan meningkatnya partisipasi dan pemahaman masyarakat, program bank sampah tidak hanya akan berhasil dalam mengurangi sampah, tetapi juga mampu membangun budaya kelola sampah yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

Sebagai kelanjutan dari analisis enam dimensi evaluasi kebijakan menurut Knill dan Tosun (meliputi pilihan instrumen, desain kebijakan, struktur pengawasan, desain kelembagaan, kemampuan administratif, dan penerimaan sosial) dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Bank Sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur telah menghasilkan dampak nyata baik bagi lingkungan, ekonomi masyarakat, maupun kesadaran kolektif warga. Namun, sebagaimana dijelaskan dalam dimensi sebelumnya, capaian positif ini masih diiringi

oleh tantangan struktural dan sosial yang memengaruhi pemerataan manfaat di seluruh wilayah.

Dari sisi lingkungan, program ini berhasil menekan volume sampah rumah tangga dan mengurangi beban TPA melalui penerapan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*). Hal ini merupakan manifestasi dari efektivitas instrumen arahan dan struktur pengawasan formal serta informal yang telah dijalankan, meskipun belum sepenuhnya merata. Dalam praktiknya, keberhasilan ini sangat dipengaruhi oleh kapasitas desain kelembagaan dan koordinasi antarlembaga, yang mendorong terbangunnya sistem kerja lintas sektor dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Dampak ekonomi juga mulai dirasakan oleh warga yang aktif berpartisipasi, terutama melalui insentif dari penjualan sampah dan sistem tabungan. Hal ini mencerminkan keberhasilan dimensi penerimaan sosial dan sebagian dari kemampuan administratif, khususnya dalam aspek inovasi program oleh pengelola bank sampah yang menjalin kerja sama dengan UMKM dan mitra daur ulang. Namun, dampak ekonomi ini belum menjangkau seluruh masyarakat karena masih terbatasnya fasilitas, kurangnya insentif yang menarik, dan minimnya dukungan dana operasional, sebagaimana telah diidentifikasi dalam dimensi kecukupan sumber daya dan dukungan anggaran.

Program ini juga berperan dalam meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat. Meningkatnya pemahaman tentang pentingnya pemilahan sampah serta partisipasi aktif warga di tingkat RT/RW menjadi indikator positif dari kemampuan SOP dan keterlibatan masyarakat yang telah disosialisasikan dengan baik. Namun, tantangan dalam implementasi SOP dan rendahnya partisipasi di wilayah tertentu menunjukkan bahwa kapasitas pelaksanaan masih perlu diperkuat melalui pendekatan edukatif dan insentif yang lebih menyeluruh.

Tantangan utama yang masih dihadapi meliputi inkonsistensi pemahaman prosedur, ketidakteraturan penyetoran sampah, serta keterbatasan anggaran untuk penguatan operasional. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh desain dan pengawasan, tetapi juga oleh kesinambungan dukungan sumber daya dan responsivitas kebijakan terhadap kondisi sosial masyarakat.

Dengan demikian, dampak positif dari Program Bank Sampah tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan sebagian dimensi implementasi kebijakan yang telah dibangun, namun keberlanjutan program ini sangat bergantung pada penyempurnaan koordinasi, pemerataan sumber daya, dan peningkatan partisipasi warga secara menyeluruh. Penelitian Remesan *et al.* (2021) menggarisbawahi pentingnya pendekatan sistemik dalam pengelolaan sumber daya lingkungan, termasuk pengelolaan sampah berbasis kebijakan dan partisipasi masyarakat. Sinergi antaraktor negara dan non-negara menjadi kunci penting dalam menata ulang sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan inklusif di kawasan perkotaan seperti Jakarta Timur.

3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program Bank Sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur telah memberikan kontribusi positif terhadap pengurangan volume sampah rumah tangga, peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pemilahan sampah, serta penciptaan manfaat ekonomi melalui sistem insentif. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhajati (2022) di Kabupaten Tulungagung, yang menekankan bahwa partisipasi masyarakat dalam penerapan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) berperan penting dalam menekan jumlah timbulan sampah menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sekaligus membangun budaya pemilahan sampah sejak dari sumber.

Lebih lanjut, temuan ini juga menguatkan hasil penelitian Megariska & Sukmana (2022) yang menunjukkan bahwa keterlibatan ibu rumah tangga dalam program bank sampah tidak hanya berdampak pada pengelolaan lingkungan, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap

pendapatan rumah tangga. Dalam konteks Jakarta Timur, manfaat ekonomi yang dirasakan warga berasal dari insentif berupa tabungan maupun kerja sama dengan pelaku usaha mikro. Namun demikian, sebagaimana juga ditemukan di Desa Larangan, penelitian ini mengidentifikasi keterbatasan pelatihan teknis dan sarana pendukung sebagai faktor penghambat utama dalam menjaga kesinambungan program. Hal ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya untuk mendukung keberhasilan jangka panjang program bank sampah.

Dari aspek pelaksanaan teknis dan pengawasan, penelitian ini menunjukkan kesesuaian dengan hasil studi Cahyadi dkk. (2018) di Kabupaten Purbalingga yang menyoroti lemahnya kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) dan belum optimalnya mekanisme pengawasan. Hal serupa ditemukan di Jakarta Timur, di mana beberapa pengelola bank sampah belum melakukan pencatatan transaksi secara sistematis, dan distribusi sampah ke mitra daur ulang seringkali mengalami kendala teknis. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, implementasi kebijakan di lapangan masih menghadapi tantangan struktural dan operasional.

Selanjutnya, penelitian ini juga memperkuat hasil temuan Hastuti & Anwar (2021) yang menekankan bahwa hambatan struktural seperti minimnya alokasi anggaran, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan keterbatasan fasilitas menjadi kendala serius dalam implementasi kebijakan lingkungan. Di Jakarta Timur, dukungan anggaran terhadap program bank sampah masih terbatas pada penyediaan alat transportasi pengangkutan, tanpa adanya alokasi dana operasional yang memadai. Hal ini berdampak pada terbatasnya kapasitas pengelolaan di tingkat lokal, sehingga diperlukan strategi pendanaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Di sisi lain, temuan penelitian ini selaras dengan studi Gimnastiar dkk. (2023) di Kota Semarang yang menekankan pentingnya tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) dalam keberhasilan pengelolaan bank sampah. Dalam konteks Jakarta Timur, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan mitra daur ulang telah berlangsung melalui pelatihan, penyuluhan, dan kegiatan operasional bersama. Namun, variasi kesiapan dan tingkat komitmen antar wilayah menunjukkan bahwa efektivitas koordinasi kelembagaan masih perlu ditingkatkan, agar seluruh unit bank sampah dapat beroperasi secara seragam dan optimal.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah yang lebih mendalam dibandingkan studi-studi sebelumnya karena menggunakan kerangka evaluatif enam dimensi implementasi kebijakan menurut Knill dan Tosun (2020). Pendekatan ini memungkinkan penelusuran yang lebih sistematis terhadap berbagai faktor pendukung maupun penghambat dalam implementasi Program Bank Sampah, mulai dari ketepatan instrumen hingga penerimaan sosial masyarakat. Oleh karena itu, temuan dalam penelitian ini tidak hanya memperkuat hasil-hasil terdahulu, tetapi juga memperluas cakupan analisis melalui sudut pandang teoritis yang lebih komprehensif dan relevan dengan dinamika kebijakan di wilayah perkotaan besar seperti Jakarta Timur.

3.3. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Salah satu temuan menarik dalam penelitian ini adalah bahwa motivasi ekonomi masih menjadi pendorong utama partisipasi masyarakat dalam program bank sampah. Dalam beberapa wawancara dengan pengelola bank sampah, ditemukan bahwa masyarakat lebih tertarik menyetorkan sampah jika ada insentif langsung berupa tabungan atau poin belanja. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran lingkungan belum sepenuhnya menjadi landasan partisipasi, dan peran insentif ekonomi masih sangat krusial sebagai pemicu awal keterlibatan warga.

Temuan lainnya menunjukkan adanya ketimpangan antarwilayah dalam implementasi program bank sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur. Beberapa wilayah memiliki pengelolaan yang aktif dan tertata, sementara wilayah lain cenderung pasif dan belum

menjalankan program dengan optimal. Ketimpangan ini dipengaruhi oleh perbedaan kapasitas sumber daya manusia, dukungan kelurahan, serta akses informasi. Temuan ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program bank sampah sangat bergantung pada konteks lokal dan kepemimpinan komunitas.

Selain itu, hasil penelitian ini juga menemukan bahwa koordinasi teknis antara pengelola bank sampah dan petugas pengangkutan dari mitra daur ulang masih menjadi kendala yang berulang. Mannu *et al.* (2022) menyatakan bahwa pendekatan teknologi, seperti pemanfaatan analisis multivariat dan spektroskopi, dapat diterapkan pula dalam pengelolaan data sampah untuk meningkatkan efisiensi sistem bank sampah. Keterlambatan pengangkutan atau jadwal yang tidak sinkron menyebabkan sampah yang telah dipilah oleh masyarakat kembali tercampur. Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena dapat menurunkan kepercayaan warga terhadap manfaat program. Dengan demikian, aspek teknis logistik harus diperhatikan secara serius sebagai bagian dari penyempurnaan sistem.

Terakhir, dalam pelaksanaan program bank sampah juga ditemukan bahwa pengelolaan data dan pencatatan transaksi di beberapa bank sampah masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi. Hal ini menimbulkan potensi kesalahan dalam pencatatan serta menyulitkan proses evaluasi kinerja. Meskipun telah ada sistem informasi seperti SILIKA dan SIPSN, belum semua pengelola memiliki kapasitas dan pemahaman untuk menggunakannya secara efektif. Maka, pelatihan literasi digital dan integrasi sistem menjadi aspek yang perlu didorong di masa mendatang.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai “Implementasi Program Bank Sampah dalam Meningkatkan Pengelolaan Sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta”, dapat disimpulkan bahwa secara umum program ini telah memberikan kontribusi nyata dalam pengurangan volume sampah rumah tangga yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Program ini juga berhasil mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis rumah tangga melalui pendekatan *reduce, reuse, dan recycle* (3R). Keberhasilan ini ditunjukkan oleh meningkatnya kesadaran sebagian warga untuk memilah sampah, serta munculnya manfaat ekonomi berupa tabungan dan insentif dari hasil penyeteroran sampah anorganik.

Implementasi program bank sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur didukung oleh sejumlah faktor seperti tersedianya dasar hukum yang jelas, struktur kelembagaan yang terorganisasi, adanya insentif ekonomi, koordinasi lintas lembaga, serta peran aktif masyarakat di beberapa wilayah. Selain itu, pengawasan dari pemerintah melalui monitoring berkala juga memberikan kontribusi positif terhadap jalannya program. Di sisi lain, program ini juga menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitasnya, seperti masih rendahnya konsistensi partisipasi masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, minimnya dukungan anggaran, dan kurangnya tenaga operasional di beberapa wilayah.

Dampak yang dirasakan dari program ini meliputi tiga aspek utama, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi. Secara lingkungan, program ini mampu menekan jumlah sampah yang langsung dibuang ke TPA. Secara sosial, program ini turut meningkatkan kesadaran warga tentang pentingnya pengelolaan sampah sejak dari rumah. Sementara dari sisi ekonomi, sebagian masyarakat memperoleh manfaat melalui insentif dari hasil penjualan sampah terpilah. Namun demikian, manfaat tersebut belum dirasakan secara merata di semua wilayah karena perbedaan tingkat keterlibatan masyarakat dan belum optimalnya sistem pendukung yang tersedia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Bank Sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur telah menunjukkan capaian positif dalam beberapa aspek, namun masih memerlukan penguatan dari sisi koordinasi kelembagaan, peningkatan kapasitas

sumber daya, serta strategi komunikasi yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Keberhasilan program ke depan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan mitra pendukung, dengan orientasi pada pembangunan sistem pengelolaan sampah yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini terbatas pada analisis implementasi Program Bank Sampah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur dengan menggunakan enam dimensi evaluasi kebijakan menurut Knill dan Tosun (2020), yakni pilihan instrumen, desain kebijakan, struktur pengawasan, desain kelembagaan, kemampuan administratif, dan penerimaan sosial. Fokus penelitian belum mencakup evaluasi kuantitatif terhadap efektivitas pengurangan volume sampah atau dampak ekonomi secara menyeluruh. Selain itu, data yang diperoleh bersifat kualitatif dan dikumpulkan dalam rentang waktu 6–25 Januari 2025, sehingga belum menangkap dinamika jangka panjang, perubahan kebijakan, atau fluktuasi partisipasi masyarakat secara temporal. Terbatasnya akses pada beberapa unit bank sampah dan variasi implementasi antarwilayah juga menjadi kendala dalam memperoleh generalisasi yang lebih luas.

Arah Masa Depan Penelitian: Penelitian mendatang disarankan untuk memperluas cakupan geografis, misalnya dengan membandingkan implementasi program bank sampah di beberapa kota/kabupaten lain di Provinsi DKI Jakarta atau di luar provinsi dengan karakteristik sosial dan kelembagaan yang berbeda. Penggabungan pendekatan kuantitatif, seperti survei persepsi masyarakat, pengukuran volume sampah berkurang, dan analisis cost-benefit, juga dapat memperkaya hasil evaluasi. Selain itu, fokus baru dapat diarahkan pada efektivitas digitalisasi dalam sistem pengelolaan bank sampah, peran insentif ekonomi terhadap partisipasi warga, dan penguatan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, serta komunitas lokal dalam membangun ekonomi sirkular yang berkelanjutan. Dengan pendekatan yang lebih integratif, penelitian ke depan diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang lebih strategis dalam perumusan kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur atas dukungan, izin, dan kerja sama yang telah diberikan selama proses pelaksanaan penelitian ini. Penulis juga mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh informan, termasuk aparatur dinas, kepala satuan pelaksana kecamatan, pengelola bank sampah, serta masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dan bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi, wawasan, serta data yang relevan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam penguatan implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, khususnya melalui program bank sampah, serta mendorong terciptanya lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan di Kota Administrasi Jakarta Timur.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Cahyadi, A., Sriati, & Fatih, A. Al. (2018). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah di Kabupaten Purbalingga. *Demography Journal of Sriwijaya (DeJos)*, 2(2), 20–24. Retrieved from <http://ejournal-pps.unsri.ac.id/index.php/dejos/article/view/36>
- Dahlan, A. V., Putri, K. R., Tsaqib, A., & Renata, Z. R. (2024). Assessment of waste management practices and waste banks in urban areas of Indonesia: A case study of East Jakarta and Depok City. *E3S Web of Conferences*, 485, 05010. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202448505010>

- Gimnastiar, M. F., Yuwono, T., & Marlina, N. (2023). Implementasi *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang (Bank Sampah Indria Jaya). *Journal of Politic and Government Studies*, 13(1), 446–463. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/42394>
- Hamdi, M. (2014). *Kebijakan Publik: Proses, Analisis dan Partisipasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hamid, H. (2018). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Sumedang: IPDN.
- Hastuti, B. D., & Anwar, F. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan. *JMPKP: Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik*, 3(2). Retrieved from <https://repo.umb.ac.id/files/original/35b454cf0688e4f8a1ba3d98e1366d4d.pdf>
- Kalra, N. (2019). Community Participation and Waste Management. In *Sustainable Waste Management: Policies and Case Studies* (Vol. 1, pp. 145–154). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-981-13-7071-7>
- Knill, C., & Tosun, J. (2020). *Public Policy: A New Introduction*. London: Bloomsbury Academic Publishing.
- Mannu, A., Poddighe, M., Garroni, S., & Malfatti, L. (2022). Application of IR and UV–VIS spectroscopies and multivariate analysis for the classification of waste vegetable oils. *Resources, Conservation and Recycling*, 180, 106088. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2021.106088>
- Megariska, R., & Sukmana, H. (2022). Implementasi Program Pengelolaan Bank Sampah Di Desa Larangan Kecamatan Candi. *Jurnal Nuansa Akademik*, 7(2), 251–266. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v7i2.1282>
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2018). *Modul Perkuliahan Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia.
- Nurhajati, N. (2022). Implementasi Program Bank Sampah Berbasis Partisipasi Masyarakat Untuk Mengurangi Penumpukan Sampah di Kabupaten Tulungagung. *Publikauma*, 10(1), 9–18. Retrieved from <https://ojs.uma.ac.id/index.php/publikauma/article/view/6617>
- Rahman, F. (2018). *Teori Pemerintahan*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Remesan, R., Prabhakaran, A., Sangma, M. N., Janardhanan, S., Mainuddin, M., Sarangi, S. K., Mandal, U. K., Burman, D., Sarkar, S., & Mahanta, K. K. (2021). Modeling and Management Option Analysis for Saline Groundwater Drainage in a Deltaic Island. *Sustainability*, 13(12), 6784. <https://doi.org/10.3390/su13126784>
- Simangunsong, F. (2019). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- SIPSN. (2023). Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah. Retrieved from SIPSN website: <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susilowati, S., & Herdiansyah, H. (2019). Application of waste bank use in reducing household waste in sub-urban area?. *Journal of Physics: Conference Series*, 1381(1), 012050. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1381/1/012050>
- Syafiie, I. K. (2019). *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia* (Cet. 12). Jakarta: Bumi Aksara.